

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA SAMPURAN KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA)

Anggun N Rajagukguk¹, Jonson Rajagukguk², L. Primawati Degodona³, Maringan Panjaitan⁴

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: anggun.rajagukguk@student.uhn.ac.id

Email: laurencia.degodona@uhn.ac.id; maringanpanjaitan@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze public perceptions regarding the Family Hope Program (PKH) in Sampuran Village, Muara District, North Tapanuli Regency. The Family Hope Program (PKH) is a social assistance program that is expected to reduce poverty rates and improve community welfare through the provision of conditional cash assistance. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Research participants consisted of beneficiary families (KPM), community leaders, and other related parties. The results of the study show that public perceptions of PKH in Sampuran Village vary, with most beneficiaries considering this program to be helpful in meeting basic needs, especially in education and health. However, there are also negative perceptions that arise related to the selection procedure which is considered non-transparent and uneven. In addition, some people feel that the assistance provided is still insufficient to significantly improve their standard of living. This study concludes that although PKH has a positive impact on the welfare of beneficiaries, there are still challenges in the implementation of the program that need to be improved to achieve more optimal goals.

Keywords: Family Hope Program, public perception, social assistance, poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampuran, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari keluarga penerima manfaat (KPM), tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap PKH di Desa Sampuran bervariasi, dengan sebagian besar penerima manfaat menganggap program ini membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat pula persepsi negatif yang muncul terkait dengan prosedur seleksi yang dinilai tidak transparan dan kurang merata. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa bantuan yang diberikan masih belum mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PKH memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penerima manfaat, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih optimal.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Persepsi masyarakat, Bantuan sosial, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan isu yang kompleks yang memerlukan perhatian yang serius. Salah satu dari dampak kemiskinan adalah rendahnya Tingkat Pendidikan. Kemiskinan dapat meningkatkan jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin (KM) dan berdampak pada Kesehatan masyarakat, termasuk risiko penyakit dan gizi buruk bagi ibu hamil, yang kemudian memengaruhi Kesehatan janin (Indrayani, 2014:2). Berdasarkan data BPS dari hasil susenas 2016-2018, presentase ibu di daerah perkotaan mengalami masalah Kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2018 mencapai 33,80%. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup (Sjafari, 2014:49). Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan berbagai anggaran untuk menjalankan program-program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan, tidak hanya fokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, pemerintah juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan dan berupaya mengatasinya. Salah satu program yang berkaitan langsung dengan dengan isu kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program perlindungan sosial ini dikenal secara luas atau dikalangan internasional sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)* (Larasati, Muda, Batubara, dan Suharyanto; 2019; Suharyanto 2015). Program ini dilaksanakan oleh kementerian sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti Pendidikan dan Kesehatan (Dulkiah, sari, dan irwandi, 2018; Kemensos, 2020).

Program PKH adalah Program bantuan sosial yang memberikan dukungan dengan syarat tertentu. Artinya setiap penerima manfaat memiliki kewajiban yang ditetapkan oleh kementerian sosial untuk memenuhi syarat bantuan ini. Program ini bertujuan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga untuk memberikan akses layanan dan fasilitas Kesehatan bagi ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, anak usia sekolah juga dapat memperoleh layanan Pendidikan melalui program ini. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses fasilitas Kesehatan dan Pendidikan tanpa terkendala. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat dan/atau seseorang miskin dengan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan utama PKH dibidang Pendidikan yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah, sedangkan PKH Kesehatan adalah status Kesehatan ibu dan anak. Sasaran PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan basis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu komunikasi antar masyarakat dengan petugas yang mengatur pelaksanaan program PKH juga berpengaruh atas berjalannya program. Untuk itu diperlukan dialog antara petugas dengan masyarakat penerima bantuan, karena dialog merupakan bentuk komunikasi paling efektif untuk menyelesaikan Kisi dalam hal untuk menghindari konflik dan membantu berjalannya program dengan baik (Purworini, 2017). Berjalannya program PKH menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat sekitar. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra. dalam pengertian psikologi persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan.

Menurut Walgito (2003) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu yang merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Dari definisi persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sesuatu, yang melakukan Tindakan perbuatan, mengamati, menanggapi, menilai, memahami, menginterpretasikan, sesuatu objek sebagai hasil dari pelaku mengamati melalui indra manusia. Mengamati pengertian persepsi diatas dapat dipahami akan timbul berbagai persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Ada yang mengarah pada hal yang positif dan ada yang negatif. Sehingga membuat persepsi yang berbeda-beda untuk masyarakat dalam

pelaksanaan PKH.

Salah satu desa yang menerima bantuan berupa PKH dari pemerintah adalah Desa Sampuran. Desa sampuran desa yang terletak dikecamatan muara kabupaten Tapanuli utara dengan jumlah penduduk sebanyak 1.160 jiwa (*sumber: data sekretaris desa sampuran*) dengan jumlah 145 KK. Namun masyarakat yang membutuhkan bantuan dipilih oleh pemerintah melalui data yang terdaftar kedalam masyarakat miskin yang memang sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Hanya sedikit dari 145 KK yang menerima bantuan PKH di desa sampuran yang telah terdata kedalam Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Tabel 1: Jumlah penerima PKH desa Sampuran dari tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah
2019	22 KK
2020	22 KK
2021	22 KK
2022	18 KK
2023	18 KK
2024	18 KK

Sumber: Sekretaris desa Sampuran.

Dari data penerima PKH diatas dari tahun 2019-2024 sekarang ini terdapat suatu perbedaan. Terlihat penurunan yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada Program Keluarga Harapan (PKH). Di desa Sampuran terdapat Analisa terkait pelaksanaan PKH diantaranya wawancara yang menunjukkan adanya kecemburuan antara penerima dan non-penerima manfaat dan ketergantungan masyarakat juga muncul, ditambah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang tujuan program. Banyak warga yang hanya memahami PKH sebagai bantuan untuk yang kurang mampu, tanpa memahami kualifikasi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan menjawab bagaimana Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus di Desa sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Definisi Denzin dan Lincon (2011) mengenai penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis. Selanjutnya, Creswell (2010) mendefinisikan kualitatif sebagai metode untuk mengubah pernyataan teoritis berdasarkan perspektif konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau menggunakan keduanya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampuran karena metode ini memungkinkan peneliti mendalami pandangan, pengalaman, dan makna yang diberikan masyarakat terkait program tersebut. Penelitian ini sangat sesuai untuk menggali persepsi subjektif masyarakat, sehingga dapat mengungkap keragaman pendapat, termasuk alasan di balik penerimaan atau penolakan mereka. Selain itu, pendekatan ini membantu memahami konteks lokal Desa Sampuran, seperti aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tanggapan masyarakat terhadap PKH. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas metode ini dalam menyesuaikan fokus penelitian jika muncul isu baru selama proses pengumpulan data. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya mengkaji hasil, tetapi juga proses, interaksi, serta faktor yang melatarbelakangi pandangan masyarakat terhadap program ini.

PEMBAHASAN

Teori Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tahap awal dari proses ini melibatkan analisis masalah, diikuti dengan identifikasi hubungan sebab-akibat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, disusun kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik yang ada. Setelah kebijakan diterapkan, kinerjanya dievaluasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Pemahaman mengenai proses ini penting bagi para pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pengguna kebijakan, guna mengurangi kesenjangan informasi antara kedua pihak. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik.

Secara etimologis, kata "kebijakan" atau "policy" berasal dari bahasa Yunani "polis," yang berarti negara atau kota, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin menjadi "politia," yang juga memiliki arti negara. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, istilah ini berkembang menjadi "policie," yang mengacu pada pengelolaan masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku seorang aktor, baik itu seorang pejabat, kelompok, maupun lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Stephen R. Covey, kebijaksanaan merupakan hasil dari integritas terhadap prinsip-prinsip yang ada, di mana integritas tersebut dianggap sebagai sumber utama. Selain itu, Covey menggambarkan kebijaksanaan sebagai hasil dari kerendahan hati (yang dianggap sebagai "ibu") dan keberanian (yang dianggap sebagai "ayah"). (Stephen R. Covey, 2005: 442).

Menurut Anggara (2014), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berhubungan dan dikeluarkan oleh instansi atau pejabat pemerintah. Kebijakan ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Keputusan dalam kebijakan publik dibuat oleh otoritas publik yang memiliki kekuasaan dan bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirumuskan oleh pihak yang memiliki mandat dari masyarakat, karena mereka bertindak sebagai representasi dari kepentingan banyak orang (Dewi, 2022).

Tujuan dari kebijakan publik secara dasar ialah untuk mewujudkan ketertiban yang berada disuatu wilayah kekuasaan ataupun ketertiban dalam menjalankan suatu sistem yang bersifat publik. Dengan adanya kebijakan maka secara personal masyarakat lebih mempunyai batasan dan aturan dalam proses implementasinya. Secara umum, tujuan kebijakan publik mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks politik, kebijakan publik berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan nilai-nilai berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Sementara itu, dalam aspek sosial, kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, mengatasi potensi kerusuhan atau konflik publik, serta memperkuat harmoni antar anggota masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan (Affrian, 2012). Kebijakan publik dirumuskan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau warga negara. Pelaksanaan kebijakan publik memiliki dampak yang luas, sehingga tidak mudah untuk diimplementasikan. Kebijakan publik juga dapat dianggap sebagai bentuk peraturan atau hukum ketika ada isu yang menghambat dan mempengaruhi kepentingan umum yang perlu diatur. Jika kebijakan publik dijadikan sebagai dasar hukum, maka diperlukan persetujuan dari berbagai pihak sebelum dapat dirumuskan dan disahkan.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, perlu ada pihak yang memiliki kewenangan. Sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan dan disahkan menjadi regulasi seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Setelah disahkan, kebijakan tersebut bersifat wajib dan harus dipatuhi. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi bagi warga negara yang melanggarnya (Anggara, 2014).

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon berbagai dan gejala sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas menyangkut intern dan ekstern.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Soeharto, dkk (2007:8) mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam alat indra manusia. Bimo Walgito (2007:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, pengeinterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu berdasarkan hal tersebut persepsi mungkin akan berbeda-beda antara individu dengan individu lainnya. Setiap orang kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek dengan cara yang berbeda-beda dengan alat indra yang dimiliki serta berusaha menafsirkannya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam menilai dan memahami sesuatu hal disekitarnya (Waidi, 2006:118).

Suharman (2005:23) menyatakan persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indra manusia menurutnya ada 3 persepsi yang sangat relevan bagi manusia yaitu pencatatan indra, pengenalan pola, dan perhatian. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat (2007:51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Dari berbagai pendapat diatas mengenai persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan hidup tertentu yang sama dalam memberikan Kesimpulan pada suatu objek berdasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lainnya menghasilkan pendapat yang berbeda-beda walaupun objeknya sama

Teori Persepsi Dalam Psikologis Sosial

Persepsi adalah proses pengorganisasian, identifikasi, dan interpretasi dari informasi sensorik untuk mewakili dan memahami informasi atau lingkungan yang dihadirkan (Schacter, 2011). Dalam semua proses persepsi, sinyal sensorik bergerak melalui sistem saraf, yang dihasilkan dari rangsangan fisik atau kimia pada sistem sensorik (Goldstein, 2009). Dalam psikologi, persepsi dapat dipahami sebagai pengalaman sensorik yang mencakup bagaimana seseorang mengenali dan menafsirkan informasi sensorik, termasuk respons individu terhadap rangsangan tersebut (Leung, Williams, & Levitas, 2022). Persepsi mencakup berbagai indera, seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan kinestetik, yang semuanya digunakan untuk memahami lingkungan dan meresponsnya sesuai kebutuhan.

Reseptor sensorik yang terus-menerus mengumpulkan informasi dari lingkungan akan memengaruhi cara manusia berinteraksi dengannya. Persepsi merujuk pada cara informasi sensorik diatur, diinterpretasi, dan disadari (Lumenlearning, 2022). Proses persepsi melibatkan pemrosesan bottom-up dan top-down. Pemrosesan bottom-up adalah cara persepsi dibentuk berdasarkan input sensorik, sedangkan pemrosesan top-down mengacu pada interpretasi sensasi yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan pikiran manusia.

Program Keluarga Harapan

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program yang dirancang untuk mendukung keluarga-keluarga kurang mampu. Program ini adalah bentuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin, dengan tujuan utama untuk mengurangi beban pengeluaran mereka melalui bantuan tunai bersyarat.

Dalam jangka pendek, PKH diharapkan membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus terlalu terbebani oleh masalah keuangan. Dengan adanya bantuan ini, mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok hingga kesehatan dan

pendidikan bagi anak-anak mereka.

Pada jangka menengah, PKH bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Anak-anak dari keluarga yang mendapatkan bantuan PKH diharapkan lebih rajin bersekolah, sementara keluarga mereka lebih peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan perubahan ini, diharapkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera bisa lahir dari keluarga penerima bantuan.

Dalam jangka panjang, PKH membawa harapan besar agar kemiskinan yang diwariskan antar-generasi bisa diputuskan. Dengan membantu keluarga miskin saat ini untuk lebih mandiri, program ini berusaha memastikan bahwa anak-anak dari keluarga ini bisa hidup lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan.

Model bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini bukanlah hal baru, berbagai negara telah melakukannya dan terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, PKH juga berfungsi sebagai penyangga bagi daya beli masyarakat miskin, terutama saat pemerintah perlu menyesuaikan harga-harga seperti bahan bakar minyak (BBM).

Program Keluarga Harapan atau kerap kali di singkat dengan PKH adalah sebuah inisiatif sosial yang memberikan dukungan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan mengubah perilaku yang berkaitan dengan kemiskinan. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mengharuskan RTSM memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Program keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Di kancah internasional, seperti ini dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berperan mengurangi angka kemiskinan serta mendorong kemandirian penerima bantuan sosial atau KPM.

Peraturan Menteri Sosial republic Indonesia no.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurnagi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dengan adanya PKH diharapkan peserta (RTSM/KSM) akan memiliki akses yang sangat baik terhadap layanan sosial dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, serta pangan dan gizi, program ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial saat mengurangi ketifakberdayaan dan keterasingan yang dialami oleh masyarakat miskin, peserta diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan dan Kesehatan. PKH setidaknya mendukung 5 komponen dari MDGs (Millennium Development Goals) yaitu Penanggulangan kemiskinan eksterm dan kelaparan, pencapaian Pendidikan dasar untuk semua, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan.

Tujuan Dan Manfaat PKH

Adapun tujuan dan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku kelompok paling miskin yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini sejalan dengan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain itu PKH juga memiliki tujuan yang sangat umum dan juga khusus. Secara umum, tujuan PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku peserta PKH yang mendukung kesejahteraan. Kemudian tujuan PKH secara khusus yaitu meningkatkan kesejahteraan Rumah tangga Sasaran Miskin/keluarga sasaran Miskin (RTSM/KSM). Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 melalui beberapa tahapan yang meliputi:

- a. Perencanaan
Perencanaan Meliputi identifikasi lokasi dan jumlah calon penerima PKH dengan merujuk pada data terpadu penanganan fakir miskin, kecuali untuk korban bencana alam, sosial, dan komunitas adat terpencil (Pasal 33).
- b. Penetapan Calon Peserta PKH
Penetapan Calon PKH Menentukan wilayah serta jumlah calon penerima berdasarkan tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh direktur yang menangani PKH (Pasal 34).
- c. Validasi Data Calon Penerima
Memeriksa kesesuaian data awal dengan bukti kondisi calon penerima PKH yang diverifikasi oleh pendamping sosial. Data yang tidak sesuai bisa diajukan kembali oleh pemangku kepentingan di daerah (Pasal 35).
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi yang kemudian ditetapkan oleh direktur terkait (Pasal 36).
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
Bantuan disalurkan secara nontunai, dengan penentuan besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi oleh direktur yang bertanggung jawab, dilakukan bertahap dalam satu tahun (Pasal 37). Tahapan selanjutnya meliputi pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan transformasi keikutsertaan, yang bertujuan untuk memastikan manfaat PKH tercapai secara efektif.

Cakupan Dan Sasaran Penerima PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

- a. Cakupan Program PKH
PKH membantu keluarga miskin dengan bantuan tunai untuk memudahkan akses mereka terhadap Layanan Kesehatan dimana Membantu akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta mencegah gizi buruk. Kemudian Layanan Pendidikan Mendukung anak-anak dari keluarga penerima agar tetap dapat bersekolah. Serta Kesejahteraan Sosial Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berat dan warga lanjut usia berusia di atas 70 tahun yang membutuhkan pendampingan.
- b. Sasaran Penerima PKH
PKH ditujukan pada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yaitu Keluarga miskin dengan ibu hamil atau anak usia 0-6 tahun, Keluarga miskin dengan anak usia sekolah (SD, SMP, atau SMA), Keluarga dengan anggota penyandang disabilitas berat, Keluarga dengan anggota lansia (70 tahun ke atas)
Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH harus memenuhi syarat dan diwajibkan menjalankan ketentuan yang ditetapkan, seperti memastikan anak bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Kendala yang dihadapi masyarakat Penerima program PKH

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampuran, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, berbagai kendala dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Meskipun program ini memberikan banyak dampak positif, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan, tetap saja terdapat hambatan yang menjadi tantangan dalam proses pelaksanaannya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Menurut penuturan salah satu informan utama, Ibu Hini Rajagukguk, seorang nenek tua berusia 75 tahun yang tinggal sendiri di rumah dan telah ditinggalkan oleh mendiang suami nya, salah satu kendala yang dirasakan adalah jarak tempuh ke tempat pengambilan bantuan. Serta tidak adanya kendaraan yang dimiliki dan tidak kuat lagi berjalan dengan jarak tempuh yang Panjang “Kadang saya harus meminta bantuan cucu atau anak atau bahkan mantu saya untuk mengantar dan menjemput, apalagi kalau musim hujan. Tapi, karena bantuan ini sangat penting untuk kebutuhan hidup saya, ya tetap saya usahakan,” katanya. Kendala ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun bagi beberapa warga, terutama lansia atau ibu dengan anak kecil, menjadi cukup menyulitkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu, Tirayun Sitanggang, seorang nenek tua dan sudah sakit-sakitan yang juga menjadi penerima manfaat PKH. Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan lain adalah kurangnya pemahaman terkait prosedur administrasi. “Kadang kami bingung soal dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pencairan bantuan. Kalau ada yang salah, jadi harus bolak-balik,” ujarnya. Namun, ibu, Tirayun Sitanggang menambahkan bahwa pendamping PKH di desa mereka cukup aktif membantu dan memberikan arahan, sehingga masalah ini bisa diatasi meski memakan waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sampuran, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Pandangan Masyarakat yang Positif terhadap PKH
Mayoritas masyarakat penerima manfaat PKH memiliki pandangan yang positif terhadap program ini. Mereka merasa bahwa PKH telah memberikan bantuan yang sangat berarti, terutama dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program ini dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga secara langsung.
2. Peningkatan Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan
PKH berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari komitmen masyarakat untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan aktif dalam kegiatan posyandu. Kesadaran ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Fourth)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dunn, William N. (2003). Gajah Mada University Press Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2015. Kebijakan Publik. Cetakan 2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jones, Charles O, (Istamto Ricky. 1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Cet kedua. ed. Nasir Budiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Letare Sainudin, Dkk Dampak Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai., 2023)
- Nurul Infitah. S.W., Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sumber Kejayaan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (2018)
- Putra, G. W. (2020). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018). Volume 5, Nomor 1, Juni 2020, 1-
- Rahmah Muin, Rosdiana, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar., 2020)
- Siswati Saragi, Analisis Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

Kecamatan Hamparan Perak, 2021)

Siregar, A. (2022). Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 52-68.

Penerbit:
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

